

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Nasly Betsyeba Mahalia Loni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
betzyebamahalia@gmail.com

Yohana Febiani Angi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
yfangi@staf.undana.ac.id

Cicilia A. Tungga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data keuangan berupa laporan realisasi anggaran dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak mandiri bahkan belum menyentuh setengah dari tingkat kemandirian tertinggi, tahun 2016 kemandirian paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “kurang” dengan persentase kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 18%, tahun 2017 kemandirian paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “sedang” naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 27%, tahun berikutnya 2018 kriteria paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “kurang” persentase kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 19%, untuk tahun 2019 dan 2020 kriteria paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “sedang” yang dicapai oleh Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 sebesar 22% dan Kota Kupang untuk tahun 2020 sebesar 21%.

Kata Kunci: *Kemandirian Keuangan, Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the financial independence of districts and cities in East Nusa Tenggara Province based on financial independence ratio analysis with a quantitative descriptive approach. Data collection was carried out using the documentation method, namely by taking financial data in the form of Budget Realization Reports from 22 Regencies/Cities in East Nusa Tenggara Province in 2016-2020. The results of the study show that the level of independence of districts/cities in East Nusa Tenggara Province Not independent has not even touched half of the highest level of independence, in 2016 the highest independence achieved was the "less" criterion with the highest percentage of independence achieved by Kupang City at 18%, In 2017 the highest independence achieved was the "moderate" criteria, an increase of one level compared to the previous year with the highest percentage of independence achieved by the City of Kupang at 27%, the following year 2018 the highest criteria achieved were the "less" criteria, the highest percentage of independence was achieved by Kupang City is 19%, for 2019 and 2020 the highest criteria achieved are the "medium" criteria achieved by West Manggarai Regency in 2019 by 22% and Kupang City for 2020 by 21%.

Keywords: *Financial Independence, Budget Realization, Local Revenue, Central Government Transfer, Local Government*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan uang, oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis) dan dibuat dalam sebuah sistem yang benar. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Halim (2012:253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi daerah yaitu memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan. Hadi (2010) dalam (Nugroho, 2017) mengungkapkan

bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber penerimaan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. PAD dapat diperoleh dengan meningkatkan pendapatan retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lainnya yang merupakan PAD yang sah dan diakui. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya.

Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintah (Roswaty, 2017). Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki 21 kabupaten dan 1 kota. Pemerintah pusat dan provinsi berperan dalam mendanai kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari dana perimbangan yang ditransfer ke setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk pembiayaan yang didapat langsung dari daerah masing-masing yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	PAD (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Alor	45.7	81.9	62.9	50.3	61.3
2	Kabupaten Belu	74.8	101.2	88.5	68.4	85
3	Kabupaten Ende	68.8	95.2	61.2	70	93.9
4	Kabupaten Flores Timur	50.1	57.5	55.6	61.1	52.5
5	Kabupaten Kupang	73.2	119	66.1	62	65.9
6	Kabupaten Lembata	35.7	37.9	42.8	51.7	44.2
7	Kabupaten Malaka	29.2	54.7	41.0	49.1	54.5
8	Kabupaten Manggarai	78.2	128.8	89.9	103.5	96.8
9	Kabupaten Manggarai Barat	91	123.4	103.3	169.9	99.3
10	Kabupaten Manggarai Timur	44.1	85.8	44	54.4	47.5

No	Kabupaten/Kota	PAD (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Kabupaten Nagekeo	29.6	46.1	30.8	31	33.1
12	Kabupaten Ngada	47.5	62.3	41.3	51.2	48.7
13	Kabupaten Rote Ndao	28.8	27.9	91	31.3	32.6
14	Kabupaten Sabu Raijua	31.4	47.7	31.1	31.9	36.4
15	Kabupaten Sikka	80.2	118.1	100.8	99.6	119.6
16	Kabupaten Sumba Barat	60.9	85.1	85.1	78.7	78.7
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	99.3	95.9	41.2	48.8	45.7
18	Kabupaten Sumba Tengah	22.1	29.5	28.7	30.4	30.5
19	Kabupaten Sumba Timur	68.2	98.2	75.4	101.4	92.3
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	71.8	189.5	71.5	77.6	64.1
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	48	77.7	51.8	58.7	56.1
22	Kota Kupang	165.4	229.1	171.4	185	167.5
	<i>Average</i>	61.1	90.6	67.1	71.2	68.5
	<i>Maximum</i>	165.4	229.1	171.4	185	147.5

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021

Tabel 1 menggambarkan rata-rata pertumbuhan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Tahun 2016 rata-rata PAD pada kabupaten/kota Di NTT 61,1 miliar, tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 90,6 miliar,tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 67,1 miliar, tahun 2019

mengalami sedikit kenaikan menjadi 71,2 miliar,turun pada tahun 2020 menjadi 68.5 miliar. Tahun 2016 sampai 2020 daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendapatan asli daerah yang paling besar adalah Kota Kupang.

Tabel 2. Dana perimbangan kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Dana perimbangan (miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Alor	796.8	821.7	873.6	851.4	785.6
2	Kabupaten Belu	676.3	779.2	719.2	743.5	670
3	Kabupaten Ende	883.9	782.9	814.1	934.1	819.9
4	Kabupaten Flores Timur	853.4	742,8	834.4	826.5	775.7
5	Kabupaten Kupang	974.5	869.2	961.3	949.2	848
6	Kabupaten Lembata	585.7	564.1	609.8	693.2	611.3
7	Kabupaten Malaka	539.8	653.6	581.7	625.6	556.4
8	Kabupaten Manggarai	818.6	815	807	880	791.6
9	Kabupaten Manggarai Barat	673.2	694.5	766.7	757.4	722.9
10	Kabupaten Manggarai Timur	691.7	684.2	764.5	7886.7	709.7
11	Kabupaten Nagekeo	611	576.1	559.6	683.9	570.9
12	Kabupaten Ngada	618.7	641.4	590.8	636.9	552.8
13	Kabupaten Rote Ndao	612.5	622.7	673.2	628.6	552.3

No	Kabupaten / Kota	Dana perimbangan (miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Kabupaten Sabu Raijua	477.4	427.3	443.9	476.9	479
15	Kabupaten Sikka	872.8	781.7	815.6	896.8	765
16	Kabupaten Sumba Barat	567.9	529.4	623.3	564.7	505.8
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	772.9	653.2	643.3	714.9	646.2
18	Kabupaten Sumba Tengah	469.1	445.3	453.4	494.9	447.8
19	Kabupaten Sumba Timur	897.1	861.8	818.5	935.6	798.1
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	942.4	980.8	1,058.70	1,034.20	977.1
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	757.4	788.4	737.7	847.9	736.5
22	Kota Kupang	926.8	822.6	901.1	874.8	810.6
	<i>Average</i>	728.2	713.3	729.6	765.4	687.9
	<i>Maximum</i>	974.5	980.8	1,058.70	1,034.20	977.1

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021

Tabel 2 menunjukkan rata-rata besaran bantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak signifikan yakni pada tahun 2016 sebesar 728.2 miliar, pada tahun 2017 sebesar 713.3 miliar, kemudian terjadi kenaikan untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dengan 729.6 miliar. 2019 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan yaitu untuk tahun 2019 sebesar 765.4 miliar dan tahun 2020 sebesar 687.9 miliar. Kabupaten/kota yang memiliki dana perimbangan paling besar dalam tahun 2016 adalah kabupaten kupang dan untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah kabupaten Timor Tengah Selatan.

Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan adanya ketidakstabilan kemandirian kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola keuangannya, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemandirian Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mengelola Keuangannya (Studi Kasus Tahun 2016-2020)”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui tingkat kemandirian kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

dalam mengelola keuangannya berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2016–2020; (2) Untuk mengetahui kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi dalam mengelola keuangannya; (3) Untuk mengetahui kabupaten/kota di NTT yang mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kontraktual antara 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan menyatakan bahwa agen tidak dapat melakukan pekerjaan atas perintah prinsipal. keagenan memberikan jawaban atas masalah yang muncul antara mitra dengan tujuan dan tugas kerja yang berkurang. Kepala sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan petunjuk untuk pemantauan, evaluasi dan saran atas pekerjaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan prinsipal adalah pihak yang menerima dan melaksanakan pekerjaan di bawah arahan prinsipal. Carr & Brower (2000) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwasanya ada dua pilihan

kontrak dalam bentuk keagenan sederhana yaitu: (1) *Behavior-based*, yaitu prinsipal harus mengawasi tingkah laku agen; (2) *Outcome-based*, yaitu adanya imbalan untuk memberikan semangat agen dalam meraih kepentingan prinsipal. Teori keagenan pada sektor publik dibagi menjadi tiga sistem yang bertingkat yaitu: (1) hubungan keagenan pihak legislatif dan eksekutif; (2) hubungan keagenan pihak legislatif dan publik; (3) hubungan pemerintah pusat dan daerah.

B. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi selanjutnya dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, Otonomi daerah adalah hak, berwenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Daerah (selanjutnya disebut daerah) merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang mencakup upaya untuk melindungi, melayani memberdayakan, serta mensejahterakan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2007).

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Adisasmita (2011) dalam (Roswaty, 2017) mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak lepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang juga dikelola baik dan benar. Pengelolaan keuangan daerah

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan daerah. Pengelolaan juga berfungsi sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kekayaan daerah baik berupa uang atau barang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sistem pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi dua yaitu (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat rencana Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya dalam satu periode akuntansi; (2) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu anggaran yang terealisasi oleh pemda dalam APBD.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

E. Dana Perimbangan

Widjaja (2008:129) mengemukakan bahwa Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemda dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan jenisnya. Dana perimbangan merupakan sumber daya daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014).

F. Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2011), bersumber dari: (1) Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN; (2) Pemerintah Daerah lain; (3) Lembaga Keuangan Bank; (4) Lembaga Keuangan Bukan Bank; (5) Masyarakat.

G. Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan negara, baik dalam bentuk pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat umum. Hubungan antara kemandirian keuangan suatu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat dan Lainnya}} \times 100\%$$

Adapun skala pengukuran kemandirian keuangan daerah berdasarkan interval sebagai berikut:

Tabel 3. Skala interval kemandirian keuangan daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 %	Sangat kurang
10,01-20,00 %	kurang
20,01-30,00 %	sedang
30,01-40,00 %	cukup
40,01-50,00 %	baik
>50,00 %	sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (2013)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sedang atau telah berlalu.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan APBD dan RAPBD kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2016-2020 beserta data lainnya yang berkaitan dengan angka dan fenomena yang menunjang penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 21 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kemandirian keuangan daerah yang merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah

terhadap dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Laporan keuangan 21 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk Tahun anggaran 2016-2020

Sampel

Jenis sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel, karena memenuhi syarat yaitu memiliki populasi kurang dari 30.

Teknik Pengumpulan Data

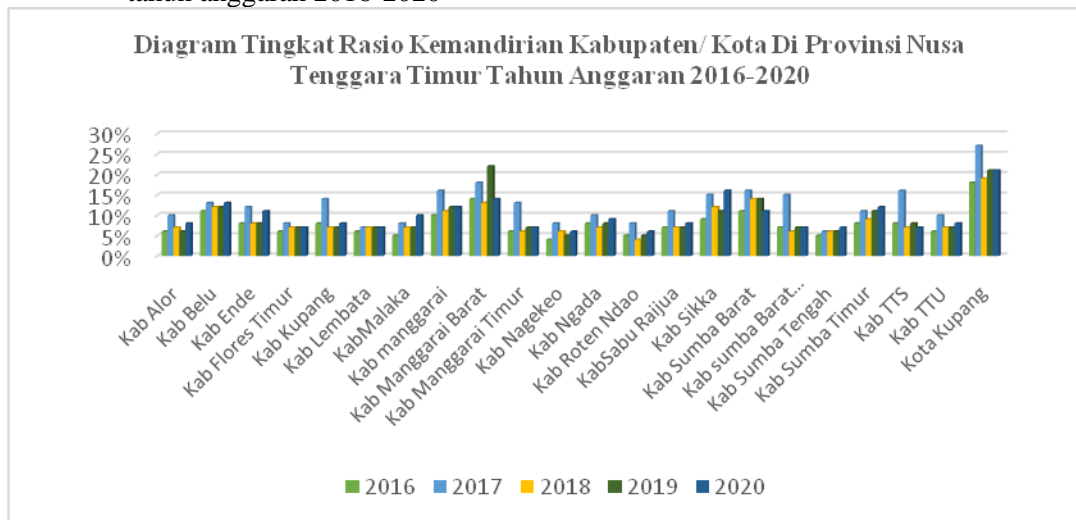
Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian daerah dimana kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan daerah, baik dalam bentuk pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat umum, yang memberikan kontribusi untuk sumber pajak daerah dan pendapatan asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Diagram tingkat rasio kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020



Sumber: Data diolah, 2022

HASIL ANALISIS

Kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Nusa tenggara timur tahun anggaran 2016 hanya mencapai kriteria paling tingginya yaitu kriteria “kurang” dengan interval 10,01%-20,00%, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini masih belum sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria “sangat kurang” dengan interval 0,00%-10,00%. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kurang adalah 3 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Belu, Manggarai Barat,

Sumba Barat dan Kota Kupang, dengan kemandirian paling tingginya dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 18.18 Kabupaten lainnya berada pada kriteria sangat kurang dimana Kabupaten dengan persentase kemandirian terkecil adalah Kabupaten Nagekeo dengan hanya mencapai 4%. Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017 mencapai kriteria yang paling tinggi yaitu kriteria “sedang” dengan interval 20,01%- 30,00 %, yang dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 27% berbeda

dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yang hanya mencapai kriteria paling tinggi di kriteria “sedang” dan Kota Kupang hanya menempati kriteria “kurang”.⁹ Kabupaten yakni Kabupaten Alor, Flores Timur, Lembata, Malaka, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemandirian paling rendah yaitu Sumba Tengah yang hanya mencapai tingkat kemandirian 6%, dan 12 kabupaten lainnya berada pada kriteria “kurang”.

Kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018 hanya mencapai kriteria paling tingginya yaitu kriteria “kurang” yaitu dengan interval 10,01%-20,00 %, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini pun masih belum sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria “sangat kurang” dengan interval 0,00%-10,00%. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “kurang” adalah 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Belu, Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat dan Kota Kupang, dengan kemandirian paling tingginya dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 19%. Sedangkan 16 kabupaten lainnya berada pada kriteria “sangat kurang” dimana kabupaten dengan persentase kemandirian terkecil adalah Kabupaten Rote Ndao dengan hanya mencapai 4%.

Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 mencapai kriteria paling tinggi yaitu kriteria “sedang” dengan interval 20,01%-30,00 %, yang dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 21%, dan Kabupaten Manggarai Barat dengan persentase kemandirian sebesar 22%. kabupaten/kota yang masuk dalam kategori sangat kurang adalah 15 Kabupaten dengan kemandirian paling rendah yaitu Kabupaten Nagekeo dan Rote Ndao dengan persentase kemandirian hanya sebesar 5%.

Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 hanya mencapai kriteria “sedang” dengan interval 20,01%-30,00 %, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini pun masih belum

sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria “sangat kurang” dengan interval 0,00%-10,00. Kota Kupang menjadi satu-satunya yang mencapai kriteria “sedang”, sedangkan untuk kriteria “kurang” dicapai oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Belu, Ende, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat dan Sumba Timur, sedangkan lebih dari setengah kabupaten yang ada yakni 13 kabupaten berada pada kriteria “sangat kurang”, dengan tingkat kemandirian terendah dicapai oleh Kabupaten Rote Ndao dengan hanya mencapai 6%.

PEMBAHASAN

Menurut kajian ekonomi dan keuangan regional NTT yang dibuat oleh Bank Indonesia (2017) 6 hal (permasalahan dan potensi ekonomi) yang dapat menghambat perekonomian NTT, diantaranya: 1) kurangnya kualitas sdm, 2) kurangnya akses listrik, 3) kurangnya akses air, 4) permasalahan pembebasan lahan, 5) permasalahan akses jalan dan 6) potensi pariwisata sebagai alternatif pendorong ekonomi di Provinsi NTT. Rendahnya kualitas SDM sendiri terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi di Indonesia. Di sisi lain, tenaga kerja di NTT juga masih didominasi oleh tingkat Sekolah Dasar ke bawah (>60%). Hal ini juga tergambar dari tingginya tingkat partisipasi murni sekolah untuk tingkat SD yang mencapai 94,56%. Sementara itu tingkat SMP baru mencapai 65,86% dan SMA (52,15%). Konsentrasi tenaga kerja yang berada di sektor pertanian sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab.

Menurut kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 yang dipublikasi oleh (Bank Indonesia, 2021) Selama tahun 2020 Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,24% (ctc), namun lebih tinggi

dibanding nasional yang berkontraksi 2,07% (ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah serta meningkatnya transaksi elektronik masyarakat mendorong pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan III 2020 sebesar 1,75% (yoy). Penurunan kinerja perekonomian pada triwulan IV 2020 terutama bersumber dari perlambatan investasi dan konsumsi rumah tangga seiring refocusing dan realokasi anggaran pemerintah serta kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dari sisi LU, melambatnya kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 terutama bersumber dari perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan ekonomi di triwulan laporan tertahan oleh masih meningkatnya kinerja LU Pertanian kehutanan, dan perikanan seiring masa panen komoditas perkebunan, namun adanya perlambatan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen sisi pengeluaran sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli

masyarakat. Dari sisi LU, kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tingkat kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur menggunakan rasio kemandirian pada tiap-tiap daerah selama tahun anggaran 2016 sampai 2020, belum mandiri bahkan belum menyentuh setengah dari tingkat kemandirian tertinggi, terbukti dengan hanya ada Kota Kupang yang selama tiga tahun berada pada kriteria yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu pun hanya mencapai kriteria sedang yang intervalnya 20,01%-30%. Sejalan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata ketergantungan kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan transfer dari pemerintah dan lainnya masih sangat tinggi, dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri, bahkan rata-rata dari pendapatan asli daerah di dapatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur masih sangat kecil dan tidak mencapai setengah atau bahkan 10% dari pendapatan transfer dari pemerintah dan lain-lain.

2. Diantara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam mengelola keuangannya adalah Kota Kupang. Sejalan dengan anggaran pendapatan asli Daerah Kota Kupang sepanjang tahun 2016 sampai 2020 merupakan yang paling tinggi diantara Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Daerah yang berbentuk kabupaten ada Kabupaten Manggarai Barat yang pada tahun 2019 mampu mencapai kriteria yang

sama dengan Kota Kupang yaitu pada kriteria sedang.

3. Diantara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap penerimaan keuangan dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Rote Ndao. Dengan tingkat kemandirian paling rendah ada pada tahun 2016 yang dicapai oleh Kabupaten Nagekeo dengan persentase sebesar 4%, menjadi yang paling rendah sepanjang tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Nagekeo juga selalu berada pada kriteria paling rendah bahkan kemandirian paling tinggi yang bisa dicapai oleh Kabupaten Nagekeo ada pada tahun 2017 dengan hanya mencapai 8%.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2021). *Kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Februari 2018*.
Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta:Salemba Empat,hal.L2-L13
Nugroho, P. (2017). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. *Info Artha*, 5, 93–106. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64>

Saran

1. Bagi Objek Penelitian

Perlunya upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam hal kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengelola sumber daya asli daerah secara maksimal.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah sumber data bagi penelitian bukan hanya menggunakan data sekonderr yang berbentuk data keuangan, namun juga dapat mendapatkan data seperti wawancara, kuesioner dan *survey*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
Prof. Dr.Haw Widjaja. (2008). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta:Rajawali Pers.
Roswaty. (2017). Analisis Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01), 21–27.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).